

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Keterlaksanaan Program Pembangunan Desa Berbasis Akuntansi Sektor Publik (studi kasus pada kantor Desa Tunbaun Amarasi Barat) , dapat di simpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program pembangunan desa telah berjalan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes). Proses perencanaan, pelaksanaan,serta pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sudah mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi sektor publik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam penyusunan laporan keuangan berbasis standar akuntansi pemerintahan desa, keterlambatan pencarian anggaran yang berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan kegiatan, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan dana dan hasil pembangunan.

Dengan demikian, penerapan akuntansi sektor publik di Desa Tunbaun sudah cukup baik dalam mendukung keterlaksanaan program pembangunan, namun perlu meningkatkan pada aspek kompetensi aparatur desa, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, serta optimalisasi peran masyarakat agar keberhasilan program dapat berkelanjutan.

5.2 Implikasi

5.2.1 Implikasi Teoritis

Hasil penelitian mengenai Keterlaksanaan Program Pembangunan Desa Berbasis Akuntansi Sektor Publik (Studi Kasus pada Kantor Desa Tunbaun, Amarasi Barat) memberikan kontribusi pada pengembangan teori dalam bidang akuntansi sektor publik, manajemen pemerintahan desa, dan evaluasi program pembangunan.

Secara teoritis, penelitian ini:

1. **Memperkaya literatur akuntansi sektor publik**

Penelitian ini memperkuat teori bahwa penerapan prinsip-prinsip akuntansi sektor publik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, dapat menjadi instrumen penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa.

2. **Memperluas konsep evaluasi pembangunan desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi keterlaksanaan program tidak hanya menilai output fisik, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek tata kelola keuangan desa, sesuai dengan teori good governance.

3. **Memberikan modal evaluasi berbasis akuntansi sektor publik di tingkat desa**

Temuan penelitian ini mendukung teori bahwa pendekatan akuntansi sektor publik dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi yang terstruktur untuk mengukur kinerja program, baik

dari sisi keuangan maupun manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat.

4. Memperkuat hubungan antara teori dan praktik pemerintahan desa
Penelitian ini memberikan bukti empiris yang mendukung teori bahwa pelaporan keuangan yang baik, keterlibatan masyarakat, dan pengawasan internal memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan program pembangunan desa.

5. Kontribusi pada teori akuntabilitas publik

Temuan menunjukkan bahwa keterlaksanaan program pembangunan yang transparan dan akuntabel tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada periode berikutnya.

5.2.2 Implikasi Terapan

Hasil penelitian Evaluasi Keterlaksanaan Program Pembangunan Desa Berbasis Akuntansi Sektor Publik (Studi Kasus pada Kantor Desa Tunbaun, Amarasi Barat) memiliki beberapa implikasi praktis yang dapat diterapkan langsung di lapangan yaitu:

1. Peningkatan kapasitas aparat desa
 - Hasil evaluasi dapat menjadi dasar pelatihan aparatur sektor publik, khususnya dalam pencatatan, pelaporan, dan pertanggung jawaban dana pembangunan.

- Dapat digunakan untuk menyusun modal peatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa.

2. Perbaikan sistem perencanaan dan pelaksanaan program

- Temuan penelitian dapat digunakan untuk menyusun prosedur kerja yang lebih jelas dan terukur dalam perencanaan pembangunan desa.
- Memperkuat koordinasi antar perangkat desa agar setiap program memiliki target, indikator, dan jadwal yang jelas.

3. Optimalisasi pengelolaan dana desa

- Hasil evaluasi membantu pemerintah desa memperbaiki mekanisme penganggaran, penyaluran, dan penggunaan dana agar lebih transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi sektor publik.
- Mengurangi potensi kesalahan atau penyalahgunaan anggaran.

4. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas

- Dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki sistem pelaporan keuangan dan progress pembangunan sehingga mudah di pahami oleh masyarakat.
- Mendorong publikasi informasi program dan laporan keuangan secara berkala kepada masyarakat melalui papan informasi, media sosial, atau forum desa.

5. Penguatan partisipasi masyarakat

- Hasil penelitian bisa digunakan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.
- Memberikan ruang diskusi dan masukan dari warga agar program sesuai kebutuhan riil di lapangan.

6. Penyusunan rekomendasi kebijakan desa

- Temuan penelitian dapat menjadi bahan masukan bagi kepala desa dan BPD untuk menetapkan kebijakan strategis pembangunan desa yang berbasis data dan analisis.